



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAMINUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 646131

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/200 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000
2. Tanah Seluas 576 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 369 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 389 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KUBU RAYA, WARISAN Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 214.500.000

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA TYPE Q Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 128.350.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 16.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.528.850.000

III. HUTANG

Rp. 42.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.486.350.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.